



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Triwulan I Tahun Anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan triwulan I Tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Jakarta, 5 April 2021

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	3
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 RENCANA STRATEGIS	5
2.1.1 VISI & MISI.....	6
2.1.2 SASARAN STRATEGIS	7
2.2 PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.3 PENGUKURAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
3.1.1 Sasaran Strategis 1.....	13
3.1.2 Sasaran Strategis 2	15
3.1.3 Sasaran Strategis 3.....	17
3.1.4 Sasaran Strategis 4.....	18
3.1.5 Sasaran Strategis 5.....	19
3.1.6 Sasaran Strategis 6.....	20
3.1.7 Sasaran Strategis 7.....	22
3.1.8 Sasaran Strategis 8.....	25
3.1.9 Sasaran Strategis 9.....	25
3.1.10 Sasaran Strategis 10.....	26
3.1.11 Sasaran Strategis 11.....	36
3.1.12 Sasaran Strategis 12.....	40
BAB IV. PENUTUP	44
4.1.Internal.....	44
4.2.Eksternal	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	3
Gambar 2 Sasaran Strategi.....	7
Gambar 3 Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020	14
Gambar 4 Presentase SDM Deputi PLK Per Maret 2021	29
Gambar 5 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang	30
Gambar 6 Data PNS dan TKK berdasarkan Jenjang Pendidikan	30
Gambar 7 Jenjang Pendidikan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perencanaan kinerja.....	8
Tabel 2 Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.....	11
Tabel 3 Kegiatan Pada Triwulan I.....	16
Tabel 4 Capaian Nilai Ekspor Produk Jasa Kehutanan	19
Tabel 5 Tingkat efektifitas penanganan sampah 2021	22
Tabel 6 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis	23
Tabel 7 Daftar Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021	26
Tabel 8 Daftar CPNS Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020.....	28
Tabel 9 Daftar TKK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021	28
Tabel 10 Jumlah Sumber Daya Manusia Deputi PLK Per Maret 2021	29
Tabel 11 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang	30
Tabel 12 Data SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	30
Tabel 13 PNS Yang Diusulkan Memperoleh Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	31
Tabel 14. PNS Diusulkan untuk Mendapatkan Kenaikan Pangkat.....	31
Tabel 15 PNS Yang Menjalani Cuti.....	35
Tabel 16 Renja Pokja RB.....	38
Tabel 17 Revisi Anggaran Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	41
Tabel 18 Realisasi Anggaran	42

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan fakta geografis, tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. 16.056 pulau telah diakui oleh PBB (dengan catatan, proses pembakuan masih terus berjalan) yang terbentang dari pulau Rondo di ujung Sumatera hingga ujung Merauke di Papua adalah fakta yang menegaskan hal tersebut. Namun tidak cuma itu, pulau-pulau yang terbentang di wilayah laut seluas 5.8 juta km² dalam wilayah Indonesia juga menegaskan posisi penting Indonesia sebagai sebuah benua maritim dengan wilayah laut mencakup 70% dari total wilayah dan terletak di posisi silang strategis jalur perdagangan dunia.

Sebagai negara yang berada pada poros perdagangan dunia, posisi silang Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus, namun Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karenanya upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menurunkan emisi dan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2021 berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan

penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran kinerja terkait pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Triwulan I Tahun 2021. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. **Mengefektifkan jalannya** koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
2. **Mengoptimalkan pengendalian** pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
3. **Melaksanakan** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara **tepat dan akurat**
4. **Membangun dan mengembangkan** kapasitas kelembagaan dan kompetensi di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang **responsif**; dan
5. **Melaksanakan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan **sesuai arahan**.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan organisasi Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputy dan 1 (Satu) Sekretaris Deputy. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat sembilan misi dimana aspek lingkungan hidup merupakan misi ke-4 yakni “Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”. Dalam mengimplementasikan misi tersebut, telah ditetapkan lima pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis yang terkait dengan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2021 yaitu :

1. Pemanfaatan kawasan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui program Perhutanan Sosial (PS);
2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan, dalam hal ini terit dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
3. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
4. Pengendalian Penanganan Sampah Laut;
5. Pengendalian Kebijakan Resiko Bencana;
6. Pengendalian Kebijakan terkait *Carbon Pricing* (Nilai Ekonomi karbon);
7. Pengembangan *Food Estate* di Sumatera Utara

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah; penumpukan sampah/sampah plastik di daratan dan sampah laut yang bersumber dari aktivitas yang berbasis daratan maupun dari laut; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim global; perambahan kawasan hutan; kebakaran hutan dan lahan (karhutla) banjir rob akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut; penataan dan restorasi gambut; penataan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik; serta faktor-faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem hutan. Untuk itu pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia harus dirancang untuk dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal dengan tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Sehingga keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi lestari, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Dalam jangka panjang diperlukan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan hutan secara menyeluruh dengan skala yang lebih luas, mencakup penataan ulang alokasi sumber daya hutan, pemenuhan komitmen Indonesia dalam kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan/gambut, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sasaran pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia ke depan secara garis besar diarahkan pada perwujudan: 1) Lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; 2). Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk capaian nilai keekonomian optimum; 3). Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4). Tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan dan kehutanan yang semakin berdaya saing.

Penciptaan kondisi lestari secara ekologi, ekonomi dan sosial ini, seyogyanya ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan dan kehutanan nasional yang berkelanjutan, karena bertujuan membuka

kemanfaatan seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya lingkungan dan kehutanan mencakup spektrum yang lebih luas, sehingga tidak hanya berdampak dalam skala lokal maupun nasional, tetapi juga mampu menjawab tantangan internasional.

2.1.1 VISI & MISI

Visi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terlepas dari 5 (lima) sasaran strategis Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang sangat terkait dengan tugas fungsi Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai pengejawantahan dari Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; dan Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan tentunya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk itu Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Visinya adalah sebagai berikut:

**“MEMBANGUN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG
BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

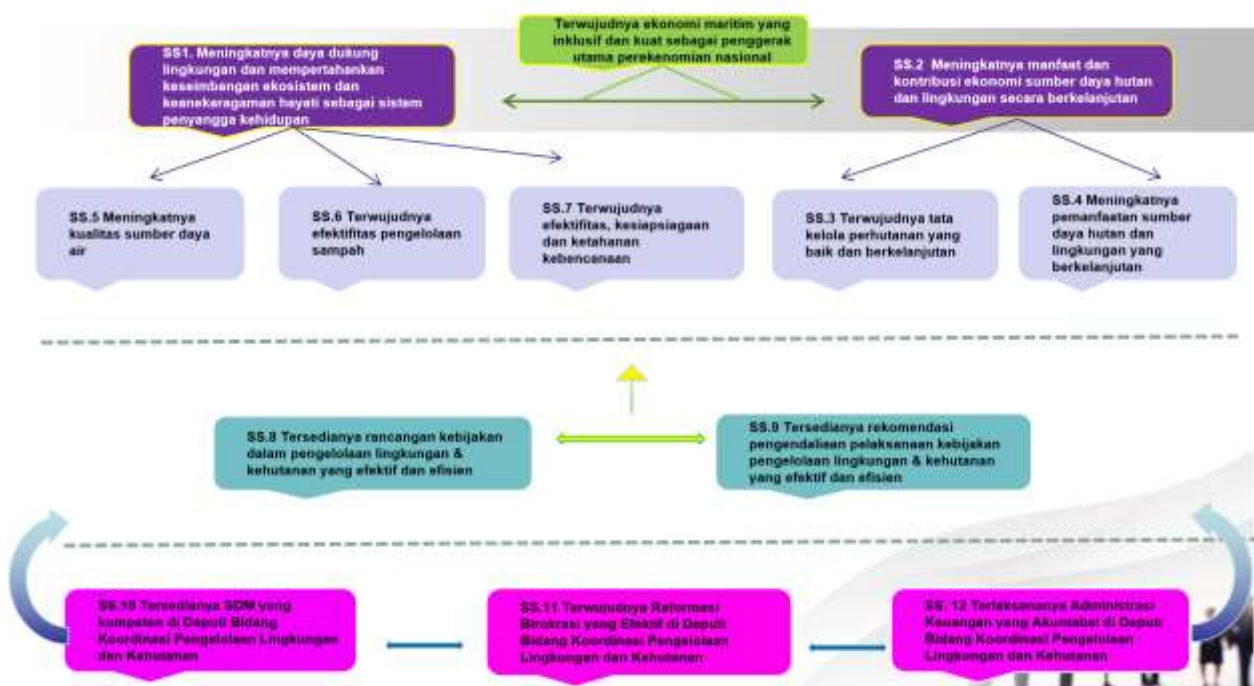
**“MENJALANKAN EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI
DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI,
EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”**

Misi tersebut merupakan langkah peran dan fungsi Kedeputian dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, tentang aspek lingkungan hidup (misi ke-4 dan agenda ke-6) dalam Pembangunan Nasional, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dan mampu merespon perubahan iklim. Pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan Sampah dan Limbah; serta Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

2.1.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputy Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada Peta strategis berikut :



Gambar 2 Sasaran Strategi

Deputy Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan membagi sasaran kedeputian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective), perspektif pengguna (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal bussines process perspective) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective).

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan melalui sasaran strategis utama yakni:

- 1) Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan; dan
- 2) Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dan dievaluasi per triwulan. Rencana dan target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perencanaan kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective			
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2 Persentase Peningkatan PDB Kehutanan	1%
Customer Perspective			
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3 Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	250.000 Ha
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4 Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	90%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5 Nilai peningkatan kualitas sumber daya air di 15 DAS Prioritas	52,7

SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	60%
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional	< 138
Internal Bisnis Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang terbitkan	50%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang terbitkan	50%
Learning & Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>70
		12	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	85
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Triwulan I Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan Tahun 2021 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan

capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui Nilai Kinerja Organisasi. Formula penghitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai kinerja, adalah sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
$X \geq 100$	$80 \leq X \leq 100$	$X \leq 80$
Memenuhi Kriteria	Belum Memenuhi	Tidak Memenuhi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didasarkan pada Stake Holders perspective, customer perspective, Internal Business Process dan Learning and Growth Pada Triwulan I Tahun 2021. Setelah itu, dilakukan analisis atas capaian terkait hal-hal yang menunjang atau menurunkan capaian kinerja, analisis sumber daya dan program penunjang tercapainya kinerja.

Tabel 2 Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN
Stakeholder Perspective					
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00	On Progress
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	Persentase Peningkatan PDB Kehutanan	1%	On Progress
Customer Perspective					
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	250.000 Ha	On Progress
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri	90%	On Progress

			hasil hutan kayu		
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air di 15 DAS Prioritas	52,7	On Progress
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	60%	On Progress
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional	< 138	On Progress
Internal Bisnis Perspective					
SS.8	Efektifitas Rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang terbitkan	50%	On Progress
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang terbitkan	50%	On Progress
Learning & Growth Perspective					
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%	On Progress
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan	>70	On Progress

			Lingkungan dan Kehutanan		
		12	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	85	On Progress
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95	On Progress

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan sebagai pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Pengelolaan lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021, dilaksanakan 12 sasaran strategis yang secara rinci dijelaskan di bawah ini:

3.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dan Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indicator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Nilai IKLH adalah indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung

proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU); (2) indeks kualitas air (IKA); (3) indeks kualitas air laut (IKAL); (4) indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem Gambut (IKTL). Berdasarkan Laporan Kinerja KLHK 2020, sebagai perbandingan atas target IKLH tahun 2021, dapat kita lihat capaian tiap indikator dari tahun 2015 hingga 2020 seperti pada gambar berikut:



Gambar 3 Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020

IKLH tahun 2020 mengalami peningkatan 3,72 poin karena adanya perbaikan IKU dan IKA, adanya perubahan pembobotan dalam rumus IKLH tahun 2020; adanya penambahan komponen indeks yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Berdasarkan penilaian dari para ahli melalui metode Analytical Hierarchy Proses (AHP), isu kualitas udara dan air dipandang sangat penting dari sisi kesehatan dan lingkungan, sehingga pembobotannya Tahun 2020-2024 naik dibandingkan dengan perhitungan IKLH tahun 2015-2019.

Pentingnya bobot IKU lebih penting karena resiko terhadap kesehatan manusia. Udara langsung dihirup oleh manusia sehingga jika udara tercemar maka resiko akan sangat tinggi, sedangkan jika air tercemar masih bisa diolah terlebih dahulu.

3.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Guna mendorong peningkatan pemanfaatan produk terutama dari hutan produksi melalui pemenuhan 80% dari target jumlah produksi hasil hutan kayu di tahun 2020 sebesar 47 juta M3 (Renstra KLHK 2020-2024, Hal: 178). Beberapa koordinasi telah dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi teknis. Kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dirasakan sangat berdampak pada sector produksi hasil hutan kayu. Penguatan koordinasi oleh Kemenkomarves dengan Kemendag, KLHK, Kemenperin, dan Kemenkeu melalui pemenuhan beberapa usulan relaksasi di sektor kehutanan telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian jumlah produksi hasil hutan kayu pada tahun 2020 sejumlah 42.145.399 M3 sama dengan 90% dari target tahun 2020 yaitu 47.000.000 M3.

Pada tahun 2021 belum dapat diketahui realisasi dari target yang ditentukan, namun pada proses mencapai target pada sasaran startegis ini pada triwulan I Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Kegiatan Pada Triwulan I

No	Uraian Kegiatan	Target	Capaian	Kendala dalam mencapai Target
1.	Integrasi Data dan Informasi Sektor Hulu dan Hilir Produk Industri Kehutanan	Dokumen Rekomendasi dan Diagram Alir Proses Bisnis Integrasi Sektor Hulu dan Hilir Produk Industri Kehutanan	Proses penyusunan kajian akademis	Data dan informasi yang masih tersebar di K/L dan Pemda, dan proses bisnis Industri hilir yang belum siap.
2.	Koordinasi kebijakan impor mesin pengolahan hasil hutan kayu dalam keadaan tidak baru dan kajian pengembangan inovasi mesin guna penguatan produk dalam negeri	Revisi lampiran Permendag 118 untuk jenis mesin yang akan diimpor dalam keadaan tidak baru, dan kajian rekomendasi pengembangan mesin pada industri dalam negeri	Penyampaian permohonan validasi data kode HS kepada Bea dan Cukai, dan validasi data kebutuhan jumlah mesin, jenis, dan spesifikasi.	Perlu identifikasi kode HS dari jenis mesin yang dibutuhkan untuk diimpor dan jumlah industri plywood yang akan restrukturisasi

3.1.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui program Perhutanan Sosial (PS). Penerapan kebijakan PS adalah mandat dari RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan merupakan salah satu program Pemerataan Ekonomi berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan PS mendukung upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Prinsip kebijakan PS adalah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat penerima izin selama 35 tahun untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan melalui usaha *agroforestry*, *silvopastura*, *silvofisheries*, ataupun jasa lingkungan dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan hutan lestari. Penerapan kebijakan PS ke depannya semakin diperkuat dengan disahkannya UU Cipta Kerja (UUCK) karena memuat pengaturan PS, sehingga akan semakin jelas arah dan orientasi untuk memajukan ekonomi dan melindungi usaha kelompok masyarakat penerima izin PS.

Program PS perlu mendapat perhatian serius Pemerintah karena realisasi pemberian izin akses PS masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada periode 2015 – 2019 capaian PS baru tercapai 3,59 juta Ha atau 28,2% dari target 12,7 juta Ha. Target tersebut tetap dilanjutkan pada periode kedua RPJMN 2020 – 2024, sehingga pemerintah masih memiliki sisa target sekitar 9,1 juta Ha. Pada tahun 2020, target PS yang ditetapkan oleh Kementerian LHK seluas 125.000 Ha, pada tahun 2021 target Capaian Luasan Lahan yaitu sebesar 250.000 Ha

Dalam rangka mendorong percepatan realisasi program pemanfaatan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial, rekomendasi kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Perhutanan Sosial yang akan fokus pada 2 (dua) strategi utama yaitu (a) percepatan pemberian izin akses dan (b) peningkatan kualitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
2. Penguatan kelembagaan Perhutanan Sosial lintas K/L di tingkat nasional melalui pembentukan Tim Percepatan Program Perhutanan

Sosial (TP2PS) Nasional.

3. Penetapan lokasi *pilot project* dan *leading sector*-nya untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis Perhutanan Sosial, secara komprehensif dan terintegrasi. K/L yang ditetapkan sebagai *Leading sector* akan mengoordinasikan pihak terkait dalam pengembangan program PS di lokasi tersebut.
4. Melalui serangkaian proses koordinasi dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Kemenko Marves, sehingga pelaksanaan program pemanfaatan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial pada tahun 2021 diharapkan tercapai **250.000** Ha atau lebih.

3.1.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari dilaksanakan dengan strategi :

- a. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya;
- b. Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan *Bioprospecting*;
- c. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari.

Pada tahun 2020 Nilai Ekspor Produk olahan kayu dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian Nilai Ekspor Produk Jasa Kehutanan

No	Jenis Produk	Nilai (US\$ Juta)
1	Panel	2.169,57
2	Furniture	1.539,94
3	Paper	3.543,89
4	Kerajinan	86,61
5	Veneer	80,81
6	Woodworking	1.076,61
7	Pulp	2.530,48
8	Bangunan Prefabrikasi	2,03
9	Chipwood (Serpih kayu)	50,45
	Total	11.080,41

Tercapai
119,78%
dari target 2020
sebesar
US\$ 9.250 juta

Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor. Dalam hal ini pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu.

3.1.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas sumber daya air

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 (SS-3) yakni berkurangnya resiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
- c. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik;
- d. Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0.91 poin dibandingkan tahun 2019, meskipun mengalami kenaikan namun tidak memenuhi target RPJMN sebesar 55,1. Terdapat 8 provinsi yang memenuhi target IKA yang ditetapkan yaitu Bengkulu, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Papua. Dan ada sebanyak 26 provinsi yang tidak memenuhi target. Parameter utama yang menyebabkan tidak memenuhi target yaitu BOD, DO, dan Fecal Coli dimana hal ini mengindikasikan bahwa sumber pencemar dari kegiatan domestic masih dominan sebagai penyebab turunya kualitas air.

Berdasarkan data yang diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2015-2020 menunjukkan ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan tinggi yaitu, DKI Jakarta, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah. Meskipun 5 provinsi ini mengalami trend IKA meningkat namun masih belum memenuhi target RPJMN. Sedangkan provinsi-provinsi yang mengalami penurunan IKA adalah Bengkulu, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua. Bengkulu, Banten dan Papua memenuhi target RPJMN namun dalam grafik menunjukkan trend yang menurun, sehingga perlu diwaspadai.

3.1.6 Sasaran Strategis 6 Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah

Sampah masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Data tahun 2017 menunjukkan jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,8 juta ton/tahun (KLHK, 2017), dimana sekitar 14 % diantaranya merupakan sampah plastik dan 24% tidak terkelola dan dibuang langsung ke lingkungan. Jumlah sampah plastik yang masuk ke perairan dan terbawa sampai ke laut diperkirakan mencapai 620.000 ton pada tahun 2020 dan diprediksi menjadi 780.000 ton pada tahun 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan semakin meningkatnya produksi dan penggunaan plastik, maka jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta berdampak buruk bagi kehidupan satwa dan kesehatan manusia.

Fakta yang muncul adalah banyak sampah yang dihasilkan dari aktivitas antroposentris di darat, tidak terkelola dengan baik sehingga berakhir

di laut. Dari kondisi ini dapat terlihat bahwa penanganan sampah di laut tidak terlepas dari efektivitas penanganan sampah di darat agar memitigasi potensi kebocoran sampah di daratan yang dibuang ke laut. Untuk itu pemerintah di tahun 2018 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang secara tegas menetapkan target penanganan sampah di laut sebesar 70% di tahun 2025. Guna menjamin tercapainya target nasional tersebut, Kemenko Marves perlu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah baik untuk sampah yang bersumber dari darat maupun yang di laut, guna memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument hukum pertama yang mengatur tentang persampahan, selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Langkah progresif juga telah dilakukan dengan mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut. Didalam kebijakan tersebut terdapat Rencana Aksi Nasional yang menjadi dasar untuk pengurangan sampah laut sebesar 70% dan penerapan pengelolaan sampah melalui 3R hingga 30% pada tahun 2025 dengan melibatkan 16 Kementerian dan Lembaga dengan 59 kegiatan. Berdasarkan pemantauan kegiatan sampai dengan tahun 2020, dari 59 kegiatan RAN PSL, terdapat 41 kegiatan atau 69% yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan dengan 9 dari 12 kegiatan atau 75% telah dilaksanakan;
- b. Strategi 2 Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat dengan 11 dari 18 kegiatan atau 61% telah dilaksanakan;
- c. Strategi 3 Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut dengan 13 dari 16 kegiatan atau 81% telah dilaksanakan;
- d. Strategi 4 Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dengan 4 dari 7 kegiatan atau 57% telah dilaksanakan;
- e. Strategi 5 Penelitian dan Pengembangan dengan 4 dari 6 kegiatan atau 67% telah dilaksanakan.

Pada tahun 2021 Tingkat efektifitas Penanganan Sampah diharapkan meningkat menjadi 60%, dalam upaya pencapaian Target tersebut telah dilakukan upaya sebagai berikut :

Tabel 5 Tingkat efektifitas penanganan sampah 2021

No	Uraian Kegiatan	Target	Capaian
1	Pengembangan Pengolahan Sampah dan Limbah Biomassa dengan teknologi RDF.		Koordinasi lintas K/L (KESDM, BPPT, KLHK) dengan hasil: 1. Disepakatinya pembentukan Pokja Percepatan Pengembangan Pengolahan Sampah dan Limbah Biomassa melalui teknologi RDF; 2. Tersusunnya konsep Kepmenko Marves tentang Pembentukan Pokja.
2	Peningkatan rasio daur ulang plastik		1. Penentuan 4 Kategori Isu yang menjadi kluster diskusi antar K/L (<i>financing, planning & licencing, supply</i>) dan identifikasi K/L terkait di masing-masing kategori isu. 2. Konsep workplan 2021-2022, sebagai bahan diskusi dalam kick off meeting <i>Joint Working Group</i> .
3	Pengintegrasian Kebijakan Penanganan Sampah		1. Telah dilakukan koordinasi lintas K/L dan Pemda Kota Medan untuk mengintegrasikan kebijakan Penanganan Sampah dengan pendekatan Ekonomi Sirkular. 2. Disepakati KESDM akan membantu penyusunan FS dan DED pembangunan TPA Regional Sumatera Utara.

3.1.7 Sasaran Strategis 7

Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 5 (SS-5) yakni meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Pengendalian dan mitigasi perubahan iklim;
- b. Pengurangan risiko dan penanganan bencana terhadap laju penurunan tanah;
- c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA);
- d. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak;
- e. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kerentanan akan bencana yang cukup tinggi akibat ciri khas geografis dan demografisnya. Secara geografis letak Indonesia berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berpotensi dan rawan akan bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami yang kerap kali menimbulkan kerusakan dan jumlah korban dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu meningkatnya aktivitas manusia yang secara tidak langsung

menyebabkan kerusakan lingkungan ditambah dengan fenomena perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim sehingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan kerap mendominasi kejadian bencana.

Adapun kegiatan yang telah terselenggara dalam rangka meningkatkan koordinasi upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selama tahun 2020 adalah rapat koordinasi lintas K/L dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di pusat antara lain dengan mengadakan Simulasi Penanganan Banjir di DKI Jakarta melalui Tactical Floor Game (TFG). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh K/L Pusat dalam menghadapi bencana banjir di wilayah DKI Jakarta.

Upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Kegiatan – kegiatan koordinasi upaya perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat difokuskan pada ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat diharapkan akan memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai *first responder* terhadap bencana sekaligus memiliki daya lenting untuk memulihkan diri ketika terdampak bencana. Beberapa kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana yang terdiri dari peningkatan kapasitas serta mengembangkan kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah.

Beberapa Kegiatan yang sudah dilaksanakan mendukung pencapaian target untuk sasaran strategis ini pada triwulan I yaitu :

Tabel 6 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Uraian Kegiatan	Target	Capaian
1.	Koordinasi RPerpres Nilai Ekonomi Karbon	Tersusunnya Perpres Nilai Ekonomi Karbon	Setneg telah mengirim surat kepada Kementerian terkait untuk permintaan paraf pada RPerpres NEK dan Kemenko Marves

			memberikan usulan revisi dalam beberapa ayat pada Rperpres NEK
2.	Koordinasi Peraturan Turunan Nilai Ekonomi Karbon	Tersusunnya Peraturan Turunan Nilai Ekonomi Karbon	Telah dilakukan inventarisasi kebutuhan peraturan turunan NEK KLHK dan Kementerian terkait sedang melakukan proses penyusunan peraturan turunan NEK dibawah koordinasi Kemenko Marves
3.	Pengawasan pemenuhan target NDC	Tercapainya target NDC sebesar 29% dengan upaya sendiri dan dapat meningkat hingga 41% dengan dukungan internasional	Telah disusun kajian terkait dengan Studi Pembelajaran dari Penyelenggaraan Instrumen NEK Domestik dan Studi Dampak Penerapan Artikel 6 Persetujuan Paris terhadap Pencapaian NDC Indonesia Telah adanya kerjasama dengan RI-AS dalam perubahan iklim untuk mencapai target NDC 41%
4.	Koordinasi Eksisting Proyek Karbon di Indonesia	Tersusunnya mekanisme proyek karbon di Indonesia	Telah diadakan rapat dalam pembahasan dalam inventarisasi proyek karbon di Indonesia

5.	Koordinasi persiapan bahan Leaders' Climate Summit dan Task Force Perubahan Iklim RI-AS	Tersusunnya ToR, area kerjasama RI-AS terkait dengan perubahan iklim untuk mencapai net zero emission tahun 2050	Telah disusun Task Force Perubahan Iklim RI-AS beserta area kerjasamanya
----	---	--	--

3.1.8 Sasaran Strategis 8

Efektifitas Rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien

Sebelum rekomendasi kebijakan dihasilkan, maka disiapkan rancangan kebijakan sebagai bagian dari proses pencapaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis ke delapan. Jumlah rancangan kebijakan yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 50% dari rancangan rancangan kebijakan dengan capaian seperti disajikan berikut:

<i>Internal Bisnis Perspective</i>				
SS.8	Terwujudnya efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%

3.1.9 Sasaran Strategis 9

Efektifitas Rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien

Rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan customer perspective berasal dari rancangan kebijakan yang dihasilkan pada level deputy (internal process) sebanyak 50% dari rancangan kebijakan. Diharapkan pada tahun 2021 target dapat tercapai sesuai dengan yang di perjanjikan.

3.1.10 Sasaran Strategis 10

Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Secara umum Sumber Daya Manusia yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan per Maret 2021 sebanyak 66 orang yang terdiri dari 38 PNS, 7 CPNS dan 11 TKK, 3 Pramubakti, 7 Driver yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7 Daftar Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021

DAFTAR PEGAWAI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN 2021													
NO	NAMA	NIP	2021	LAMA MASA KERJA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT	Pendidikan Terakhir	Jurusan	JABATAN	ASAL INSTANSI	STATUS PEGAWAI	KETERANGAN
1	Dr. K. Nani Hendiari, M.Sc.	19671024 198312 2 001	1983	28	Perempuan	Pembina Utama Madya, IV/d	01/04/2017	S3	Biologi Laut, University of Rostock	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BPPT	Dipekerjakan	Eselon I
2	Dirhansyah Conbul, M.Sc.	19701004 200212 1 001	2002	19	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b		S2	Christian albrechts University Of Kiel, Germany	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP		Eselon Ila
3	Sugeng Harmono, S.Hut., M.Si.	19730223 199903 1 001	1999	22	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/10/2018	S2	Imu Lingkungan, Universitas Indonesia	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon Ila
4	Dr. Farianna Prabandari, S.Hut., M.Si.	19740221 199903 2 002	1999	22	Perempuan	Pembina Tk. I, M/b		S3	Kajian Lingkungan dan Pembangunan Univ. Brawijaya	Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon Ila
5	Mochamad Saleh Nugraha, S.Si., M.Sc., Ph.D.	19710313 198701 1 001	1987	24	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/04/2018	S3	Physical Oceanography, Kyushu University	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konsentrasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BPPT	Kerniko Bidang Kemanitan	Eselon Ila
6	Rofi Alharif, S.Pi, M.Sc.	19720509 198703 1 002	1987	24	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/10/2016	S2	Coastal Management Aarhus University Denmark	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon Ila
7	Kus Pristahadi S.Pi, M.Sc, Ph.D	19700925 199503 1 001	1995	26	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/04/2015	S3	Engineering Science, Kyushu University	Asisten Deputi Pengelolaan Penubuhan Kim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon Ila
8	Dr. Nurul Istikomah, S.Pi., M.Si.	19730618 198803 2 001	1988	23	Perempuan	Pembina Tk. I, M/b	01/10/2017	S3	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB	Kepala Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon Ila
9	I. M. Rizal Parrelly, MTP	196811233 198403 1 010	1984	27	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/10/2010	S2	Perencanaan Kota dan Daerah, UGM	Kepala Bidang Penanganan Limbah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Penda Kab. Banggai	Kerniko Bidang Kemanitan	Eselon Ila
10	Zainuddin, S.Hut., M.Si	19721005 200212 1 008	2002	19	Laki-laki	Pembina Tk. I, M/b	01/04/2020	S2	S2 Manajemen, Universitas Khairun Terate	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Hutan Produksi, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemprov Maluku Utara	Kerniko Bidang Kemanitan	Eselon Ila
11	Muhammad Suhandar, S.E., M.Si	19721027 200003 1 001	2000	21	Laki-laki	Pembina, IV/a	01/10/2016	S2	Administrasi Publik, Universitas Terbuka	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon Ila
12	Yenung Secasari, MSc	19800203 200312 2 003	2003	18	Perempuan	Pembina, IV/a	01/10/2019	S2	Ocean Engineering and Port Development, UNESCO-HE Netherlands	Kepala Bidang Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konsentrasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BRSDM-KKP	Kerniko Bidang Kemanitan	Eselon Ila
13	Agustinah, SH, MH	19730814 200112 2 004	2001	20	Perempuan	Pembina IV/a	01/04/2017	S2	Magister Ilmu Hukum	Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Prov Banten	Kerniko Bidang Kemanitan	Eselon Ila
14	Fatma Puspitasari, S.Sos, M.Si	19790504 200312 2 001	2003	18	Perempuan	Pembina IV/a		S2	Hukum, Universitas Indonesia	Kepala Bidang Pengendalian, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Ombudsman	Dipekerjakan	Eselon Ila

15	Agus Gunawan, ST, M.Eng.	19690812 199803 1 001	1998	23	Laki-laki	Pembina IV.a		S2	Material Science, Toyohashi University of Technology	Kepala Bidang Konsensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon IIa
16	Harimurti, S.P., MA.	19731225 200003 1 001	2000	21	Laki-laki	Pembina IV.a		S2	School of Geography, University of Leeds, United Kingdom	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Gambut, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon IIa
17	Rendra Kurnia Hasan, S.H., M.Env	19820927 200901 1 006	2009	12	Laki-laki	Penata Tk. I, III d		S2	Perindungan Lingkungan, Universitas Griffith, Australia	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon IIa
18	Rita Octafani, S.E., M.A.B	19781025 200604 2 004	2006	15	Perempuan	Penata Tk. I, III d		S2	Keuangan Negara, STIA LAN	Kepala Bidang Pengelolaan Perubahan Kimi, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Kimi dan Kebencanaan	KKP		Eselon IIa
19	La Ode Nurman Mbay, Msi	19750806 200801 1 016	2008	13	Laki-laki	Penata Tk. I, III d		S2	Sarjana Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			Eselon IIa
20	Ike Rachmawati, S.Hut	19731007 199903 2 003	1999	22	Perempuan	Penata Tk. I, III d	01/04/2012	S1	Kehutanan IPB	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Kabupaten Bungo		Eselon IIa
21	Farida Ahmad, SAP	19700108 198909 2 001	1989	32	Perempuan	Penata Tk. I, III d	01/10/2017	S1	Ilmu Administrasi Publik, STIA LAN	Kepala Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemda NTT	Kemerkom Bidang Kemanifan	Eselon IIa
22	Henry Antonius Manalu, S.H., M.H	19730603 199903 1 002	1999	22	Laki-laki	Penata Tk. I, III d	01/10/2017	S2	Hukum Pidana Ekonomi, UNS	Kepala Bidang Pengendalian Kebencanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Kimi dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Kemerkom Bidang Kemanifan	Eselon IIa
23	Devita Salfri Nur Akbar, S.Kom, M. Env	19840705 200604 2 002	2006	15	Perempuan	Penata Tk. I, III d	01/04/2019	S2	Environmental Protection, Griffith University	Kepala Bidang Jasa Pemanfaatan Karbon, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Kimi dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon IIa
24	Titim Nursiah, S.Pi., M.Si	19741113 200701 2 017	2007	14	Perempuan	Penata Tk. I, III d	01/10/2019	S2	Ilmu Administrasi Negara, UNDAYAN Baubau	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkot Baubau	Kemerkom Bidang Kemanifan	Eselon IV a
25	Diky Mahardika, S.Pi	19820817 201101 1 006	2011	10	Laki-laki	Penata, III c	01/04/2019	S1	Sosok Penikatan, IPB	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemprov Bali	Kemerkom Bidang Kemanifan	Eselon IV a
26	Eli Syalfri, SE	19860202 200501 2 002	2005	16	Perempuan	Penata Muda Tk. I, III b	01/10/2019	S1	Ekonomi, STIE Perdagangan	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkab Solok	Kemerkom Bidang Kemanifan	Eselon IV a
27	Achmad Kimsan, S.IP	19790409 200502 1 007	2005	16	Laki-laki	Penata Muda, III a	01/04/2017	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkot Baubau	Kemerkom Bidang Kemanifan	Pelaksana
28	Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T	19900314 201801 2 001	2018	3	Perempuan	Penata Muda Tk. I, III b	01/01/2019	S2	Teknik Lingkungan, ITB	Analisis Kebijakan AHI Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Kimi dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Fungsional
29	Nur Faujani Faleh, S.I.Kom	19831230 201801 2 001	2018	3	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi, Univ Diponegoro	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
30	Lusy Pebrianti, S.Si	19940216 201801 2 002	2018	3	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Statistika, Universitas Padjadjaran	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
31	Sandy Pratiwi, S.I.Kom	19930903 201801 2 001	2018	3	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations Jakarta	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
32	Makna Fathana Sabila, S.Si., M.Si	19920106 201901 2 001	2019	2	Perempuan	Penata Muda Tk. I, III b	01/01/2019	S2	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, IPB	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
33	Ti Wahyu Rahmanto, S.Kel	19880615 201901 1 001	2019	2	Laki-laki	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
34	Yoco Aprianto, S.Farm., Apt.	19930408 201901 1 001	2019	2	Laki-laki	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Farmasi Sains dan Teknologi, UGM	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
35	Indira Wido Primadita, S.T	19950604 201901 2 001	2019	2	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Kimi dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
36	Ardha Yosef Retmana, S.Kel	19910421 201901 1 001	2019	2	Laki-laki	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro			PNS	Pelaksana
37	Easter Debora, S.T	19920406 201902 2 004	2019	2	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
38	Grisella Meiranda, S.Tr	19970511 201901 2 001	2019	2	Perempuan	Penata Muda, III a	01/01/2019	S1	Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Maritim dan Transportasi "AMN" Semarang	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana

Tabel 8 Daftar CPNS Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020

DAFTAR CPNS 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN								
NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Penempatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aditya Rizki Pramudita, SH	19920731 202012 1 001	Laki-Laki		01/12/2020	S1	Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
2	Raka Panji Wibowo, S.Kom	19950408 202012 1 001	Laki-Laki		01/12/2020	S1	Sistem Informasi, Universitas Gunadarma	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
3	Rosmini Yanti, S.H	19950912 202012 2 001	Perempuan		01/12/2020	S1	Ilmu Hukum, Universitas Syah Kuala	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Data
4	Arif Rahmadi, S.Kel	19951213 202012 1 001	Laki-Laki		01/12/2020	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Padjajaran	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
5	Rizky Fauziah, S.Tr.M	19960605 202012 2 001	Perempuan		01/12/2020	D4	Manajemen Aset, Politeknik Negeri Bandung	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
6	Zahra Rani Bilqis, S.T.	19970108 202012 2 001	Perempuan		01/12/2020	S1	Teknik Kelautan, Insitut Teknologi Bandung	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
7	Jamila Rizki Nur'aini, S.Pi	19971030 202012 2 001	Perempuan		01/12/2020	S1	Perikanan, Universitas Diponegoro	Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan

Tabel 9 Daftar TTK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021

DAFTAR TTK DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN 2021									
NO	NAMA	TUGAS JABATAN	PENEMPATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO ID	PENDIDIKAN	TANGGAL LAHIR	UMUR	
1	Debby Yolanda	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Jakarta, 04 November 1994	1.2E+08	SMA	1994-04-11	27	
2	Akrom	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Pati, 3 Juni 1986	1.2E+08	S1	1986-03-06	35	
3	Mukhlisa Arif Hanubun	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA	Tual, 28 Agustus 1992		S1	1992-08-28	29	
4	Aby Maulana Putra	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA						
5	Natrika Febriyanti	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Jakarta, 18 Februari 1990		D3	1980-02-18	41	
6	Moch. Riefky Ruswondo	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Jakarta, 15 Juni 1997		S1	1997-06-15	24	
7	Hilal Maulana Firdaus	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Bogor, 03 Oktober 1990		S1	1990-10-03	31	
8	Nurmita Wasanda	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Jakarta, 23 November 1996	1.2E+08	S1	1996-11-23	24	
9	Abunaim Arifin	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pinrang, 17 September 1992	1.2E+08	S1	1992-09-17	29	
10	Devi Rizki Indiani	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan						
11	Eka Indri Saputri	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan						

Pada Tabel 5 tentang data PNS lingkup Deputi PLK terdiri dari Pejabat Eselon I yaitu Deputi PLK, Eselon 2 sebanyak 6 yaitu sekretaris Deputi, dan 5 Asisten Deputi . untuk Pejabat Eselon III telah terisi sebanyak 14 jabatan, dan eselon IV adalah 3 jabatan terisi. 1 pejabat Fungsional dan sisanya adalah pejabat pelaksana.

Pada Tabel 6. Data tentang CPNS yang ditempatkann terhitung pada 1 Januari 2021 menjelaskan tentang jumlah CPNS yang ditempatkan di Deputi PLK dan telah terdistribudi pada keasdepan dan kesekretariatan.

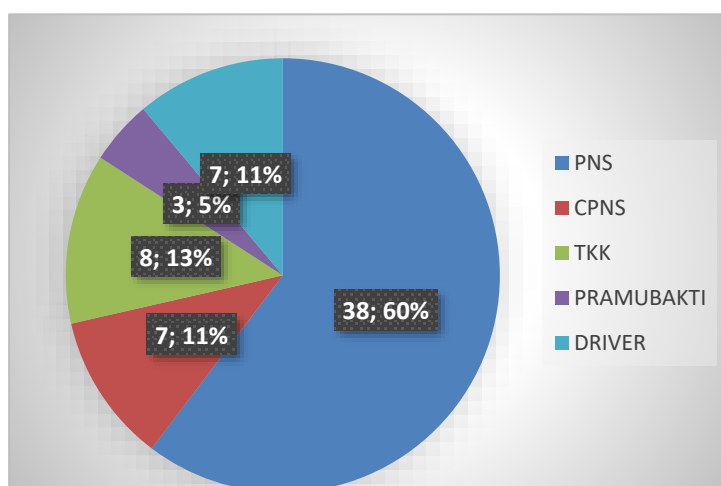
Pada Tabel 7 tentang data tenaga kerja kontrak sejumlah 11 orang yang telah terajdi penambahan dari tahun sebelumnya.

Untuk jumlah keseluruhan sumber daya manusia di Deputi PLK sebanyak 66 orang dengan penambahan 3 orang Pramubakti dan 7 orang driver namun belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan dalam pemenuhan beban kerja baik pada kesekretariatan maupun pada keasdepan lingkup Deputi PLK.

Tabel 10 Jumlah Sumber Daya Manusia Deputi PLK Per Maret 2021

STATUS JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PNS	38
CPNS	7
TKK	11
PRAMUBAKTI	3
DRIVER	7
JUMLAH	56

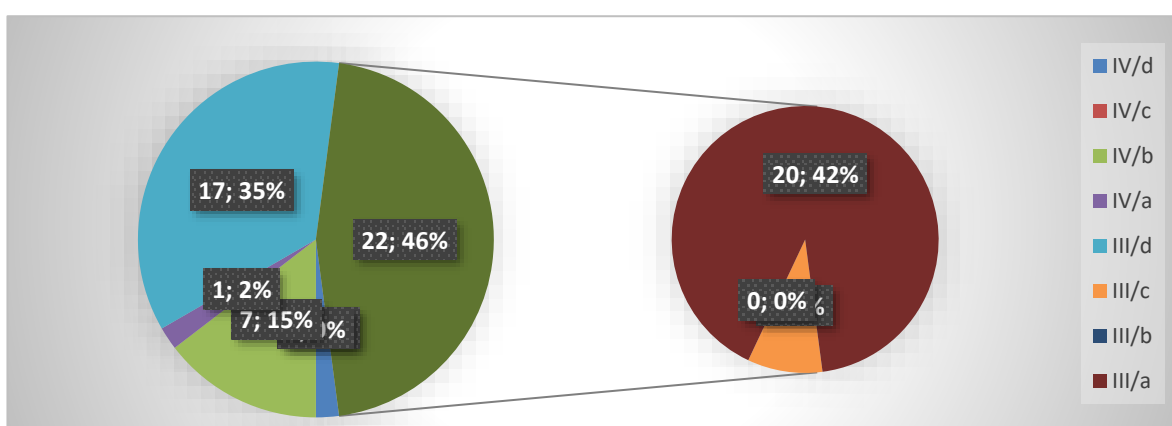
Tergambar dalam diagram berikut :



Gambar 4 Presentase SDM Deputi PLK Per Maret 2021

Tabel 11 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

No	Jumlah PNS	Golongan/Ruang							
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a
1	38 Orang PNS	1	-	7	1	17	2	-	10
2	7 Orang CPNS	-	-	-	-	-	-	-	10

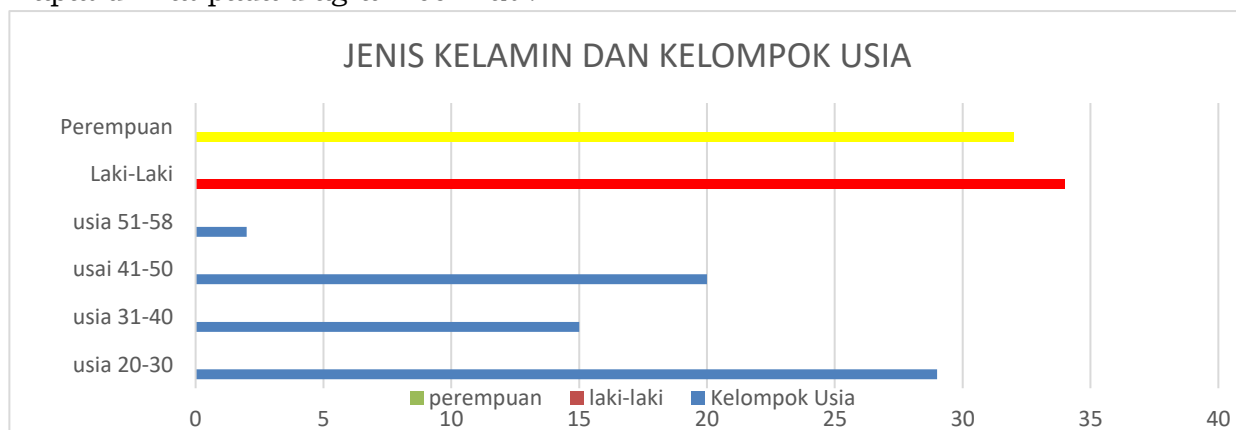


Gambar 5 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 12 Data SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

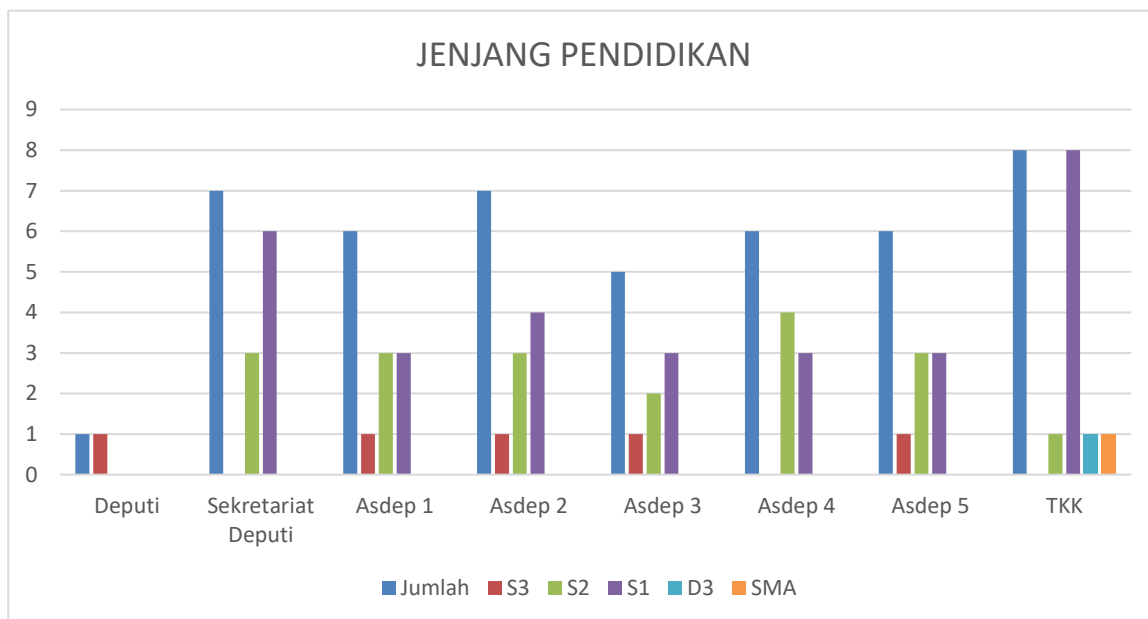
No	Jumlah PNS	Jenis Kelamin		Kelompok Usia			
		L	P	20-30	31-40	41-50	51-58
1	66 Orang	34	32	29	15	20	2

Dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 6 Data PNS dan TKK berdasarkan Jenjang Pendidikan

Disajikan dalam diagram berikut :



Gambar 7 Jenjang Pendidikan

Tabel 13 PNS Yang Diusulkan Memperoleh Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KARYA SATYA (TAHUN)
1	Diky Mahardika NIP. 19820817 201101 1 006	Kepala Sub Bagian Pelaporan	X

*) KARYA SATYA **10** TAHUN

Tabel 14. PNS Diusulkan untuk Mendapatkan Kenaikan Pangkat

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Kenaikan Pangkat Yang Diusulkan	Keterangan
1	Nani Hendiarti	Pembina Utama Madya, IV/d TMT 4/1/2017	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina Utama, IV e	Kenaikan Pangkat Pilihan
2	Kus Prisetiahadi NIP.1970092	Pembina Tk. I, IV/b TMT 4/1/2015	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan	Pembina (IV/c)	Kenaikan Pangkat Pilihan

	5 199503 1 001		Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		
3	Rofi Alhanif NIP,1972050 9 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b TMT 10/1/2016	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina (IV/c)	Kenaikan Pangkat Pilihan
4	Farida Achmad NIP.1970010 8 198909 2 001	Penata TK I ,IIId TMT. 10/1/2017	Kepala Bagian Adiminstrasi Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
5	Agustinah NIP.1973081 4 200112 2 004	Pembina/IV.a TMT. 10/1/2017	Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan,Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi	Pembina Tk. I, IV/b	Kenaikan Pangkat Reguler

			Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		
6	Ike Rachmawaty NIP.19731007 199903 2003	Penata TK I ,IIId TMT. 4/1/2012	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan , Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
7	Henry Antonius Manalu NIP.19730603 199903 1002	Penata TK I ,IIId TMT. 10/1/2017	Kepala Bidang Pengendalian Kebencanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
8	Harimurti NIP.19731225 200003 1001	Pembina/IV.a TMT. 10/1/2017	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Gambut, Asisten Deputi Planologi	Pembina Tk. I, IV/b	Kenaikan Pangkat Reguler

			Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		
9	Agus Gunawan NIP.1969081 2 199803 1 001	Pembina/IV.a TMT. 10/1/2017	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pembina Tk. I, IV/b	Kenaikan Pangkat Reguler
10	Elfi Syafitri NIP.1986020 2 200501 2 002	Penata Muda Tk. I, III/b. TMT 10/1/2019	Kepala Sub BAGian Pemantauan dan Evaluasi	Penata, III/c	Kenaikan Pangkat Pilihan
11	Ahmad Kimsan NIP.1979040 9 200502 1 007	Penata Muda, III/a TMT 10/1/2019	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang	Penata Muda Tk. I, III/b	Kenaikan Pangkat Reguler

			Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		
--	--	--	--	--	--

Tabel 15 PNS Yang Menjalani Cuti

NO	NAMA/ NIP	JENIS *)	JML HARI	Tgl Mulai-Tgl. Selesai	Keterangan
1.	Farida Achmad	Cuti Tahunan	3 hari		slesai
2.	Titim Nursiah	Cuti Tahunan	6 hari		slesai
3.	Indira Wido Primadipta	Cuti Alasan Penting	6 Hari		slesai
4.	Nur Fajriani Fallah	Cuti Tahunan	6 Hari		slesai
5.	Lusi Pebrianti	Cuti Tahunan	3 Hari		slesai

*) Jenis : *Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, Cuti Luar Tanggungan Negara*

Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui selama melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkup Deputi Bidang Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah :

1. Perubahan SOTK dan penyederhanaan birokrasi sangat berpengaruh dalam penyusunan Anjab dan ABK serta SOP kedeputian;
2. Belum lengkapnya dokumen kepegawaian PNS, menyebabkan :
 - a. Data kepegawaian pada Aplikasi MarvesHR tidak lengkap
 - b. Belum termonitornya kenaikan gaji berkala
 - c. Belum selesainya Perpindahan gaji beberapa pejabat baru dari tempat asal
3. Sistem penyampaian berkas/dokumen kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberian penghargaan dan cuti oleh Bagian Kepegawaian langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan sehingga Bagian

Ketatausahaan dan Pelaporan Sekretariat Deputi IV kesulitan untuk memperbaharui data kepegawaian dan pembuatan laporan triwulan dan tahunan.

4. Kebijakan moratorium oleh Kemenko Marves terhadap penerimaan mutasi pegawai baik dari instansi daerah maupun vertikal sangat berpengaruh kepada pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai yang ada saat ini dengan beban kerja yang begitu tinggi khususnya masing-masing jabatan pelaksana pada unit keasdepan, dan pelaksana pada kesekretariatan.
5. Pelatihan yang diadakan oleh kementerian atau Lembaga terkait lebih kepada pelatihan teknis yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsi kemenko marves;
6. Masih kurangnya kesadaran PNS dalam mengisi presensi kehadiran pelaksanaan tugas bekerja di kantor (WFO) menggunakan Aplikasi Absensi Online maupun manual yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam rekapitulasi kehadiran.

3.1.11 Sasaran Strategis 11

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Untuk capaian Sasaran Strategis 11 ini mempunyai 2 indikator Kinerja Utama, seperti Berikut :

SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>70	On Progress
		12	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	85	On Progress

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah mulai melakukan berbagai

program pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi *good governance* dalam pengelolaan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* adalah program reformasi birokrasi.

Dalam program reformasi birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang terdiri dari organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia. Reformasi Birokrasi Nasional ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Agenda Reformasi Birokrasi difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan triwulan I merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Lingkup Deputy PLK Tahun 2020, telah membentuk Tim Pokja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menetapkan Rencana Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Tahun 2021 meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yang ditargetkan untuk dilaksanakan sesuai Nota Dinas Sesdep PLK No : ND.030/DIV.0/Marves/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021.

Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2021 di Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sebagaimana Renja Pokja RB yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Renja Pokja RB

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA KERJA		OUTPUT	PELAKSANAAN		
					TW I		
					Jan	Feb	Mar
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1	Membentuk Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan RB, ZI dan AOC	SK. Tim Kelompok Kerja RB, ZI dan AOC			
		2	Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	Dokumen Rencana Kerja RB Deputi PLK tahun 2021			
		3	Fasilitasi penyusunan Renja AOC Tahun 2021	Dokumen Rencana Kerja Renja AOC Tahun 2021			
		4	Internalisasi Renja RB dan Renja AOC Lingkup Deputi PLK	Dokumen kegiatan sosialisasi Renja RB dan Renja AOC lingkup Deputi PLK Tahun 2021			
		5	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RB dan AOC lingkup Deputi PLK Tahun 2021 secara berkala	Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB dan AOC Deputi PLK Tahun 2021			
				Laporan Pelaksanaan RB dan AOC Tahun 2021.			
		6	Membentuk Tim/Assesor PMPRB lingkup Deputi PLK Tahun 2021	Nota Dinas Usulan Tim/Assesor PMPRB Deputi PLK Tahun 2021			
7	Fasilitasi pelaksanaan PMPRB Deputi PLK Tahun 2021	Dokumen hasil PMPRB sesuai LKE RB lingkup Deputi PLK					
		Berita Acara Konsensus					
2	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	Melakukan pemetaan dan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron bidang Kemaritiman dan Investasi	Laporan hasil pemetaan dan analisis Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron			
		2	Fasilitasi Penyusunan dan, atau penyalarsan Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis	Dokumen Peraturan/Kebijakan Menko Marves yang disusun oleh Deputi PLK			
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1	Melaksanakan koordinasi tindak lanjut dengan Biro Hukum terkait evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan Tahun 2020	Hasil Evaluasi Kelembagaan, Permenko Nomor 10 Tahun 2020, Peta Proses Bisnis			
		2	Membuat bagan struktur organisasi dan peta jabatan Deputi PLK Pasca Penyederhanaan Birokrasi	Struktur Deputi PLK dan Peta Jabatan Pasca Penyederhanaan Birokrasi			
4	PENATAAN TATA LAKSANA	1	Penyusunan SOP Deputi PLK Pasca Penyederhanaan Birokrasi	SOP Lingkup Deputi PLK			
		2	Menyusun Kebijakan Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen Kebijakan Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (SOP/SE)			
		3	Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis bagi Jabatan Pelaksana Teknis (JPT) lingkup Deputi PLK	Dokumen Kamus Kompetensi Teknis JPT Deputi PLK			
		4	Sosialisasi SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi dan Kebijakan Standar Pelayanan Keterbukaan Publik	Dokumen Laporan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Publik			

	PENATAAN TATA LAKSANA	5	Evaluasi SOP dan Kebijakan Standar Pelayanan Keterbukaan Publik	Laporan kegiatan sosialisasi			
				Dokumen SOP dan Kebijakan Standar Pelayanan Keterbukaan Publik telah disesuaikan/direvisi sesuai hasil evaluasi			
		6	Penataan Arsip lingkup Deputi PLK	Laporan Penataan Arsip			
		7	Evaluasi implementasi Aplikasi SIMAS dan PCM	Laporan Hasil Evaluasi dan Perbaikan Sistem Informasi (SIMAS DAN PCM)			
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1	Penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Pasca Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi PLK	Dokumen ANJAB dan ABK			
		2	Melaksanakan evaluasi terhadap sistem kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan menyusun rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi CPNS	Laporan hasil evaluasi dan dokumen Analisis Kebutuhan Diklat bagi CPNS			
		3	Pengiriman peserta Bimtek/Diklat lingkup Deputi PLK	Nota Dinas Usulan mengikuti Diklat/Bimtek dan SPT			
		4	Penyusunan dan Penetapan Kinerja Individu/PNS lingkup Deputi PLK	Dokumen SKP lingkup Deputi PLK Tahun 2021			
		5	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja individu secara berkala	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Individu (Monev PK per Triwulan dan SKP akhir tahun)			
				Dokumen Reward/punishment pegawai sesuai hasil monev kinerja individu			
		6	Monev terhadap pelaksanaan peraturan disiplin pegawai/kode etik dan evaluasi jabatan sesuai SKJ	Laporan Hasil Monev			
7	Menginformasikan akun Aplikasi Marves HR kepada seluruh pegawai Lingkup Deputi PLK dan Update Data Kepegawaian pada Aplikasi Marves HR	Nota Dinas Informasi Akun Sistem Informasi Kepegawaian dan Screenshot Aplikasi MARVES HR					
		Laporan Hasil Update Data Kepegawaian dan Screenshot Hasil penginputan pada Aplikasi Marves HR					
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	1	Penyusunan Perjanjian Kinerja PNS sampai dengan level Staf	Dokumen PK Tahun 2021			
		2	Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi lingkup Deputi	Dokumen Renja dan Renaksi			
		3	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja melalui bimte/pelatihan terkait pelaporan akuntabilitas kinerja	SPT dan Laporan hasil bimtek/pelatihan			
		4	Penginputan Capaian Kinerja Unit pada Aplikasi SIK-M Kemenko Marves	Penilaian kinerja dalam SIK-M (BSC)			
		5	Melaksanakan pemantauan/evaluasi kinerja unit Deputi PLK secara berkala	Laporan hasil Pemantauan (LAKIP) Triwulan			
		6	Melaksanakan pemantauan/evaluasi dokumen SAKIP unit Deputi PLK secara berkala	Laporan hasil Pemantauan (SAKIP) Triwulan			

7	PENGUATAN PENGAWASAN	1	Melaksanakan public campaign	Laporan hasil sosialisasi/Poster/Video			
		2	Fasilitasi penyusunan <i>Risk Assesment</i> dan sosialisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Dokumen Risk Assesment			
		3	Melakukan evaluasi penanganan/ pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan Evaluasi			
		4	Melakukan pengawasan tindak lanjut temuan Internal dan BPK	Laporan tindak lanjut			
		5	Mendorong keaktifan pegawai dalam mengisi LHKPN/LHKASN	Dokumen Pelaporan LHKASN/LHKPN			
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1	Menyusun Standar Pelayanan	Dokumen SOP/ SE Standar pelayanan			
		2	Melaksanakan sosialisasi/pelatihan pelayanan prima	Dokumen/Laporan hasil sosialisasi/ pelatihan			
		3	Menyusun sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Dokumen Nota Dinas/SE, SK Tim Penilai Penerima Penghargaan (Role Mode)			
		4	Membentuk Unit Pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan prima	Diklat Pelayanan Publik			
		5	Melaksanakan survei pemberian pelayanan Publik Deputi PLK	Survey kepada stakeholder			
		6	Melakukan evaluasi pemberian pelayanan publik Deputi PLK	Dokumen Laporan Evaluasi pelayanan publik Deputi PLK			

Sebagaimana tabel di atas, dapat digambarkan bahwa sebagian besar Rencana Kerja Pokja RB Triwulan I dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB, penginputan capaian kinerja pada aplikasi SIK-M, dan pemantauan/evaluasi dokumen SAKIP triwulan I yang akan dilaksanakan pada awal April 2021.

3.1.12 Sasaran Strategis 12

Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Kinerja pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya dinilai dari segi kecepatan dan ketetapan didalam pengajuan SPP oleh masing-masing PPK di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ataupun kecepatan dan ketepatan dalam penerbitan PPSPM menerbitkan SPM untuk pengajuan percekungan dana di KPPN. Lebih dari itu kinerja pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan di Lingkup PPK dalam membuat dan

menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan uang Negara sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan SPJ keuangan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan melalui mekanisme pengelolaan UP/GUP selama ini tidak mengalami kendala sama sekali, karena rata-rata dokumen pengajuan UP/TUP dapat diselesaikan paling lama 1 (satu) minggu dan seluruh dokumen sudah diselesaikan dalam bentuk dokumen rampung.

Pengelolaan SPJ Keuangan yang sedikit agak mengalami kendala adalah SPJ Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan LS, karena sebagian besar kegiatan dilakukan dengan LS. Jumlah SP2D LS dan UP/TUP pada Triwulan I sebanyak 127 dokumen dan yang sudah dirampungkan seluruhnya sebanyak 49 yang belum lengkap 78.

Revisi Anggaran Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan sebanyak 3 kali revisi DIPA dengan data sebagai berikut :

Tabel 17 Revisi Anggaran Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

No	Revisi Anggaran	Tanggal DIPA	Nomor DIPA	Keterangan
1	Revisi ke-1	12 November 2020	SP DIPA-120.01.1.350494/2021	DIPA Awal
		8 Januari 2021	SP DIPA-120.01.1.350494/2021	Revisi DIPA
2	Revisi ke-2	29 Januari 2021	SP DIPA-120.01.1.350494/2021	Revisi DIPA
3	Revisi ke-3	16 Februari 2021	SP DIPA-120.01.1.350494/2021	Revisi DIPA

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan I per tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Data SAS adalah sebesar Rp. 1.360.761.966,- (9.67%) dari total pagu anggaran Rp. 14.075.000.000,- yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS .

Tabel 18 Realisasi Anggaran

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	10.776.350.000	931.773.864
5996	Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	10.776.350.000	931.773.864
5996.ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1.275.000.000	0
ABJ.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan	645.000.000	0
ABJ.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah	630.000.000	0
5996.ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	641.350.000	8.400.000
ABS.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan	641.350.000	8.400.000
5996.ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1.260.000.000	11.750.000
ABV.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	630.000.000	0
ABV.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	630.000.000	11.750.000
5996.AEA	Koordinasi	7.600.000.000	911.623.864
AEA.001	Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata	1.473.650.000	187.670.301
AEA.002	Koordinasi Pengelolaan Produk	1.470.000.000	89.501.884
AEA.003	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.681.350.000	269.092.275
AEA.004	Koordinasi Pengelolaan Sampah dan	1.470.000.000	202.918.818
AEA.005	Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim	1.505.000.000	162.440.586
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.298.650.000	428.988.102
5601	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3.298.650.000	428.988.102
5601.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	756.550.000	172.321.002

EAB.005	Layanan Perencanaan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	525.480.000	172.321.002
---------	--	-------------	-------------

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi
EAB.012	Layanan Perencanaan Anggaran Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	231.070.000	0
5601.EAC	Layanan Umum	1.138.650.000	149.702.984
EAC.008	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	594.800.000	136.162.324
EAC.014	Layanan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	543.850.000	13.540.660
5601.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	225.000.000	39.074.000
EAH.006	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	225.000.000	39.074.000
5601.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.178.450.000	67.890.116
EAL.006	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	653.450.000	57.490.116
EAL.012	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	525.000.000	10.400.000

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi dari rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama bulan Januari – Maret 2021 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktifitas di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala, baik internal maupun eksternal, yaitu:

4.1. Internal

- a. Kekurangan jumlah tenaga (pejabat dan pegawai pelaksana) Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan masih belum teratasi/terpenuhi.
- b. Masih terdapat pelaksana kegiatan yang belum dapat memfokuskan dan menjabarkan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi utama bagian/unitnya.

4.2. Eksternal

- a. Masih banyak regulasi dan atau kewenangan yang tumpang tindih serta adanya ego sektoral Kementerian/Lembaga, pemda yang dapat menghambat lajunya pembangunan di bidang kemaritiman.
- b. Fluktuasi kondisi ekonomi regional dan global.

Laporan ini diharapkan mampu memenuhi akuntabilitas kinerja lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dan menjadi bahan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Jakarta, 5 April 2021

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nani Hendiarti', written over a faint, light-colored watermark or background graphic.

Nani Hendiarti